

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan menjadi persoalan global, terutama bagi negara-negara berkembang (Fadila, 2023). Masalah kemiskinan mencuri perhatian pemangku kebijakan dunia, sebagaimana tertuangkan dalam bentuk program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs ini diantaranya adalah tanpa kemiskinan (SDGs 1), Tanpa Kelaparan (SDGs 2), Kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs 3), Pendidikan berkualitas (SDGs 4), Pekerja'an layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8). (Iskandar, 2020).

Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,03% atau lebih dari 26 juta jiwa, dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp582.932 per kapita per bulan (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi positif dalam beberapa tahun terakhir, distribusi hasil pembangunan belum merata dan belum cukup efektif menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikatakan miskin ketika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan per desa dan per kotaan Indonesia tercatat sebesar Rp582.932 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906 atau 75% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026 atau 25 % persen per kapita per bulan.

Masalah kemiskinan mempunyai tantangan dan peluang berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga pemecahan masalahnya dibutuhkan pengkajian solusi yang komprehensif dan kebaruan. Menurunkan angka kemiskinan menjadi cita cita negara berkembang termasuk Indonesia.

Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2022 dan juga data BPS, Indonesia memiliki 38 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Jawa, Indonesia, dengan posisi strategis di bagian barat. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 35.377,76 km². Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan publik (Handalani, 2019). Berikut ini data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024:

Tabel 1. 1 Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024

TAHUN	PERINGKAT KEMISKINAN TERTINGGI (NASIONAL)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT (%)
2020	★ 3	3.920.230 ★	7,88
2021	2	4.195.340	8,4
2022	2	4.070.980	8,6
2023	2	3.888.600	7,62
2024	2	3.668.350	7,08

Sumber: Data BPS 2024 (Diolah)

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-3 kategori provinsi yang berpenduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh jiwa dengan tingkat kemiskinan 7,88 persen. Pada tahun 2021 justru Provinsi Jawa Barat mengalami kondisi kemiskinan yang meningkat sehingga menempati posisi peringkat ke-2 setelah Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak empat juta seratus Sembilan puluh lima tiga ratus empat puluh jiwa dengan tingkat kemiskinan yang meningkat menjadi 8,4%. Sampai tahun 2024 kondisi Jawa Barat masih menjadi provinsi termiskin ke-2 secara Nasional. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 mencapai 3,67 juta jiwa atau 7,46%, turun menjadi 7,08% pada September 2024 (BPS, 2024). Penurunan ini menunjukkan perbaikan, namun belum menyentuh akar persoalan karena kemiskinan

struktural tetap mengakar di berbagai daerah, terutama kawasan perdesaan dan wilayah pinggiran kota besar seperti kabupaten Indramayu dan kabupaten Kuningan. Berikut ini gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota:

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Per Kabupaten/Kota (Persen)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		Rata-Rata	Peringkat
		2023	2024		
1	Bogor	7,27	7,05	7,16	18
2	Sukabumi	7,01	6,87	6,94	19
3	Cianjur	10,22	10,14	10,18	8
4	Bandung	6,4	6,19	6,295	21
5	Garut	9,77	9,68	9,725	9
6	Tasikmalaya	10,28	10,23	10,255	7
7	Ciamis	7,42	7,39	7,405	16
8	Kuningan	12,12	11,88	12	2
9	Cirebon	11,2	11	11,1	4
10	Majalengka	11,21	10,82	11,015	5
11	Sumedang	9,36	9,1	9,23	11
12	Indramayu	12,13	11,93	12,03	1
13	Subang	9,52	9,49	9,505	10
14	Purwakarta	8,46	8,41	8,435	14
15	Karawang	7,87	7,86	7,865	15
16	Bekasi	4,93	4,8	4,865	23
17	Bandung Barat	10,52	10,49	10,505	6
18	Pangandaran	8,98	8,75	8,865	13
19	Kota Bogor	6,67	6,53	6,6	20
20	Kota Sukabumi	7,5	7,2	7,35	17
21	Kota Bandung	3,96	3,87	3,915	26
22	Kota Cirebon	9,16	9,02	9,09	12
23	Kota Bekasi	4,1	4,01	4,055	25
24	Kota Depok	2,38	2,34	2,36	27
25	Kota Cimahi	4,66	4,39	4,525	24
26	Kota Tasikmalaya	11,53	11,1	11,315	3
27	Kota Banjar	6,14	5,85	5,995	22

Sumber: Data BPS Jawa Barat, 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel persentase tingkat kemiskinan 27 Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, diperoleh data tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat terletak pada Kabupaten Indramayu dengan perolehan angka tingkat kemiskinan sebesar 12,3%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan ke-2 di Jawa Barat dengan persentase sebesar 12%, setelah Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya menjadi urutan ke-3 di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,3%. Kemudian Kabupaten Cirebon menjadi urutan ke-4 dengan presentasi kemiskinan 11,1% dan diikuti oleh Kabupaten Majalengka dengan presentasi kemiskinan sebesar 11,05%. Dalam hal ini justru Kota Depok menjadi daerah yang mempunyai tingkat presentasi terendah sebesar 2,36% dan selanjutnya diikuti Kota Bandung sebesar 3,9%. Kemiskinan yang terjadi ini membutuhkan adanya peran pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Fadillah, 2021). Pertumbuhan ekonomi klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan indikator keberhasilan yang bergantung pada distribusi pendapatan yang merata (Zulaika, et al., 2024). Salah satu pendapatan yang diperoleh oleh Wilayah Jawa barat adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Zahirudin, et al., 2024). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali belum sepenuhnya bisa menyerap program yang berdampak positif terhadap masyarakat miskin. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan dan prinsip dasar ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sosial. APBD memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan harapan akan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat tetap menjadi tantangan besar, terutama di kalangan pemuda. Pengangguran yang tinggi berkontribusi pada stagnasi ekonomi rumah tangga dan peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kemiskinan. Hubungan pengangguran dan kemiskinan erat kaitannya. Jika masyarakat sudah bekerja, maka dinilai memiliki kesejahteraan yang tinggi, sebaliknya jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan, maka akan menimbulkan pengangguran dan tingkat kemiskinan akan bertambah. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan.

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam mengatasi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan fluktuasi dan menjadi daerah yang berpenduduk miskin terbesar ke-2 secara nasional.

Tingkat kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, dan Kapasitas Fiskal daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data BPS menunjukkan bahwa TPT Jawa Barat sempat mencapai 10,46% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, sebelum menurun menjadi 8,31% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya pengangguran berpotensi memperburuk kemiskinan akibat hilangnya pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang semula berkontraksi -2,44% pada 2020 kemudian pulih menjadi 5,45% pada 2023, memberikan harapan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, APBD yang meningkat dari Rp46,3 triliun pada 2020 menjadi Rp51,4 triliun pada 2023, mencerminkan potensi kebijakan fiskal dalam mendukung

program pengentasan kemiskinan, khususnya jika diarahkan pada sektor prioritas.

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kabupaten/kota, Tingkat pengangguran terbuka mengacu pada proporsi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara APBD dihitung berdasarkan alokasi dana realisasi anggaran belanja daerah. Kemiskinan, sebagai variabel dependen, akan diukur berdasarkan indikator tingkat kemiskinan yang mencakup proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Gujarati dan Porter (2009), penggunaan data time series selama beberapa tahun memiliki keunggulan dalam menangkap dinamika variabel ekonomi secara lebih akurat, terutama dalam mengidentifikasi pola fluktuasi, tren, serta hubungan sebab-akibat antarvariabel. Penggunaan data dalam kurun waktu yang cukup panjang, seperti lima tahun, memungkinkan peneliti untuk menguji ketahanan dan konsistensi hubungan antarvariabel dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

Provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, namun dalam hal ini angka kemiskinan di Jawa Barat juga tinggi. Dalam hal ini tentu timbul kesenjangan yang diluar kendali dari sebuah teori ekonomi, sebagaimana biasanya ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yang cukup tinggi harapannya kemiskinan akan rendah, sehingga dalam hal ini diperlukan menggali beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kemiskinan di Jawa Barat, terutama ketiga faktor yang sudah diduga mempunyai interaksi untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan alokasi APBD secara bersama-sama dapat mempengaruhi kemiskinan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk pemerintah daerah dalam

mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat untuk masa yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa fenomena yang dinarasikan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan relative tinggi di Indonesia.
2. Pengangguran terbuka sebagai problematika sosial di Jawa Barat
3. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat relative tinggi

C. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada kondisi kemiskinan di Jawa Barat periode tahun 2020-2024.
2. Fokus utama penelitian ini berkonsentrasi pada fluktuasi tingkat kemiskinan Jawa Barat selama lima tahun terakhir Selama 5 Tahun terakhir.
3. Indikator yang akan diuji adalah tingkat kemiskinan (variable dependen) proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kabupaten/kota, Tingkat pengangguran terbuka mengacu pada proporsi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, APBD dihitung berdasarkan alokasi dana total realisasi pengeluaran pemerintah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penting untuk menganalisis sejauh mana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan APBD terhadap Kemiskinan di Jawa Barat. Adapun beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh APBD daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024?
4. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran Terbuka, dan APBD secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Menganalisis pengaruh APBD terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran Terbuka, dan APBD secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020-2024.

F. Manfaat Penelitian

Dengan teridentifikasinya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan APBD terhadap Kemiskinan di Jawa Barat selama tahun 2020-2024, maka hasil yang diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperluas khasanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian ekonomi islam

khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, TPT, dan APBD terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020–2024 sebagai sarana evaluasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya. Ini diharapkan menjadi sebuah sumbangsih bahan pertimbangan terhadap pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat dan efektif.

